

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 23 /SEOJK.05/2019
TENTANG
RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
6. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
7. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
9. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
10. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;
 - 4) rencana pendanaan;

- 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,
- e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
 - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
 5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:

- a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Perusahaan baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan;
 - 2) arah kebijakan Perusahaan, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan Perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
7. Dalam menyusun analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Perusahaan dapat menggunakan analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).
8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana penyaluran pembiayaan yang paling sedikit meliputi:

- a. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan;
 - b. rencana penyaluran pembiayaan kepada debitur inti;
 - c. rencana penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait;
 - d. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi; dan
 - e. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi pembiayaan.
10. Debitur inti sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b merupakan debitur perseorangan atau debitur badan usaha yang termasuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada Perusahaan di luar pihak terkait dengan nilai pembiayaan awal minimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 11. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
 12. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 13. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. rencana pelaksanaan cara pembiayaan lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. rencana penggunaan akad lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. rencana perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad lain yang sebelumnya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

- e. rencana pelaksanaan kegiatan berbasis imbal jasa yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - g. rencana perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad yang sebelumnya telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
- a. rencana pemenuhan rasio permodalan;
 - b. proyeksi permodalan; dan
 - c. rencana perubahan modal.
16. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi rencana perolehan pendanaan dari:
- a. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan;
 - b. rencana pendanaan berdasarkan mata uang; dan
 - c. rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
18. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

19. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor cabang, kantor cabang UUS, kantor selain kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang UUS;
 - b. rencana peningkatan status kantor selain kantor cabang menjadi kantor cabang dan peningkatan kantor selain kantor cabang UUS menjadi kantor cabang UUS;
 - c. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang UUS, kantor selain kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang UUS; dan
 - d. rencana penutupan kantor cabang, kantor cabang UUS, kantor selain kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang UUS.
20. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia;
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan

- b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - 3) rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - 4) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya;
 - c. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Perusahaan;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan.
- 22. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 23. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 7) disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.
- 24. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, nilai tukar, dan tingkat inflasi; dan

- 2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan pendanaan, tingkat bunga/imbalance hasil pendanaan, tingkat bunga/imbalance hasil pembiayaan, dan rasio piutang pembiayaan bermasalah; dan
- b. informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif;
 - 3) proyeksi laporan arus kas; dan
 - 4) proyeksi rekening administratif.
25. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 24 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
27. Rencana Bisnis yang memuat:
 - a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 - c. rencana pemenuhan rasio permodalan pada rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a;
 - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 17;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 24; dan
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 26,disajikan:
 - 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan

- 4) dalam rupiah penuh.
28. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi:
- a. rencana penyertaan langsung;
 - b. rencana aksi keuangan berkelanjutan;
 - c. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
 - d. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan;
 - e. rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - f. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS.
29. Rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
30. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf b disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik
31. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf c disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
32. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf d disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
33. Rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf e disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

34. Rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf f disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
35. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
 - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
 - g. rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a;
 - h. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf c;
 - i. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf d;
 - j. rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf e; dan
 - k. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf f,
- memuat juga uraian mengenai:
- 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
 - 2) strategi Perusahaan untuk merealisasikan rencana dimaksud.

36. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

- b. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan.
6. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
 7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
 8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
 - a. untuk Perusahaan Pembiayaan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710; atau
 - b. untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

9. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 23 /SEOJK.05/2019

TENTANG

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN SYARIAH

DAFTAR ISI
FORMAT RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Format 1	: Ringkasan Eksekutif	3
Format 2	: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya	9
Format 3	: Visi, Misi, dan Strategi Bisnis	10
Format 4	: Rencana Kegiatan Usaha	11
Format 5	: Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	33
Format 6	: Rencana Permodalan	38
Format 7	: Rencana Pendanaan	41
Format 8	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi	50
Format 9	: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi	52
Format 10	: Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan	60
Format 11	: Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu	90
Format 12	: Rencana Penyertaan Langsung	93
Format 13	: Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan	94
Format 14	: Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan Pembiayaan	97
Format 15	: Rencana Konversi Perusahaan Pembiayaan Menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah	98
Format 16	: Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahan UUS	99
Format 17	: Laporan Realisasi Rencana Bisnis	101
Format 18	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	103

Format 1 : Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun
 - a.
 - b.
 - c. dst.
2. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun
 - a.
 - b.
 - c. dst.
3. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun
 - a.
 - b.
 - c.

4. Indikator Keuangan Utama

a. Format Indikator Keuangan Utama bagi Perusahaan Pembiayaan

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Total Aset				
2.	Total Piutang Pembiayaan				
	a. Pembiayaan Investasi				
	b. Pembiayaan Modal Kerja				
	c. Pembiayaan Multiguna				
	d. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
e. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah					
3.	Pinjaman Dalam Negeri				
4.	Pinjaman Luar Negeri				
5.	Penerbitan Surat Berharga				
6.	Ekuitas				
7.	Laba (Rugi)				
8.	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
	a. Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
	b. Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
9.	Rasio Permodalan (%)				
10.	Rasio NPF Bruto				
11.	Rasio NPF Neto				
12.	Rentabilitas				
	a. <i>Return on Asset</i>				
	b. <i>Return on Equity</i>				
	c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
	d. <i>Net Interest Margin</i>				
13.	Likuiditas				
	a. <i>Current Ratio</i>				
	b. <i>Cash Ratio</i>				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan indikator keuangan mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

b. Format Indikator Keuangan Utama bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Total Aset				
2.	Total Piutang Pembiayaan Syariah				
	a. Pembiayaan Jual Beli				
	b. Pembiayaan Investasi				
	c. Pembiayaan Jasa				
3.	Pendanaan Dalam Negeri				
4.	Pendanaan Luar Negeri				
5.	Penerbitan Surat Berharga				
6.	Ekuitas				
7.	Laba (Rugi)				
8.	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
	a. Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
	b. Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
9.	Rasio Permodalan (%)				
10.	Rasio Aset Produktif Bermasalah Bruto				
11.	Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto				
12.	Rentabilitas				

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
	a. <i>Return on Asset</i>				
	b. <i>Return on Equity</i>				
	c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
	d. <i>Net Interest Margin</i>				
13.	Likuiditas				
	a. <i>Current Ratio</i>				
	b. <i>Cash Ratio</i>				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan indikator keuangan mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

c. Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan

<p>(uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan beserta proyeksi yang tercermin dari indikator keuangan utama)</p>
--

5. Uraian Mengenai Target Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun¹⁾

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Keterangan:

¹⁾ antara lain meliputi penurunan piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), peningkatan penyaluran pembiayaan, peningkatan efisiensi Perusahaan, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan.

Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

(diisi dengan penjelasan mengenai pokok-pokok realisasi rencana bisnis periode sebelumnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut)

Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Perusahaan

.....
.....

2. Misi Perusahaan

.....
.....

3. Strategi Bisnis Perusahaan

a. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha

.....
.....

b. arah kebijakan Perusahaan

.....
.....

c. strategi pengembangan bisnis

.....
.....

Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha

1. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

a. Tabel Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan bagi Perusahaan Pembiayaan

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Penyaluran Pembiayaan Baru:				
1. Pembiayaan Investasi				
a. Sewa Pembiayaan				
b. Jual dan Sewa-Balik				
c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran				
f. Pembiayaan Proyek				
g. Pembiayaan Infrastruktur				
h. Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan				
2. Pembiayaan Modal Kerja				
a. Jual dan Sewa-Balik				

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
d. Fasilitas Modal Usaha				
e. Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan				
3. Pembiayaan Multiguna				
a. Sewa Pembiayaan				
b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran				
c. Fasilitas Dana				
d. Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan				
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
Total Rencana Penyaluran Pembiayaan Baru				
B. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. Pembiayaan Investasi				
a. Sewa Pembiayaan				
b. Jual dan Sewa-Balik				

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran				
f. Pembiayaan Proyek				
g. Pembiayaan Infrastruktur				
h. Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan				
2. Pembiayaan Modal Kerja				
a. Jual dan Sewa-Balik				
b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
d. Fasilitas Modal Usaha				
e. Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan				
3. Pembiayaan Multiguna				
a. Sewa Pembiayaan				
b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran				

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
c. Fasilitas Dana				
d. Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan				
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

- b. Tabel Rencana Penyaluran Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Pembiayaan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Penyaluran Pembiayaan Syariah Baru:				
1. Pembiayaan Jual Beli				
a. <i>Murabahah</i>				
b. <i>Salam</i>				

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
c. <i>Istisna'</i>				
d. Akad Selain Akad Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Sampai Dengan Huruf c				
2. Pembiayaan Investasi				
a. <i>Mudharabah</i>				
b. <i>Musyarakah</i>				
c. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
e. Akad Selain Akad Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Sampai Dengan Huruf d				
3. Pembiayaan Jasa				
a. <i>Ijarah</i>				
b. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>				
c. <i>Hawalah</i> atau <i>Hawalah bil Ujrah</i>				
d. <i>Wakalah</i> atau <i>Wakalah Bil Ujrah</i>				
e. <i>Kafalah</i> atau <i>Kafalah bil Ujrah</i>				
f. <i>Ju'alah</i>				
g. <i>Qardh</i>				

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
h. Akad Selain Akad Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Sampai Dengan Huruf g				
Total Rencana Penyaluran Pembiayaan Syariah Baru				
B. Saldo Piutang Pembiayaan Syariah (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. Pembiayaan Jual Beli				
a. <i>Murabahah</i>				
b. <i>Salam</i>				
c. <i>Istisna'</i>				
d. Akad Selain Akad Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Sampai Dengan Huruf c				
2. Pembiayaan Investasi				
a. <i>Mudharabah</i>				
b. <i>Musyarakah</i>				
c. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
e. Akad Selain Akad Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Sampai Dengan Huruf d				

Jenis Penggunaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3. Pembiayaan Jasa				
a. <i>Ijarah</i>				
b. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>				
c. <i>Hawalah</i> atau <i>Hawalah bil Ujrah</i>				
d. <i>Wakalah</i> atau <i>Wakalah Bil Ujrah</i>				
e. <i>Kafalah</i> atau <i>Kafalah bil Ujrah</i>				
f. <i>Ju'alah</i>				
g. <i>Qardh</i>				
h. Akad Selain Akad Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Sampai Dengan Huruf g				
Total Saldo Piutang Pembiayaan Syariah (<i>Outstanding Principal</i>)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

c. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan)

d. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan)

2. Rencana Penyaluran Pembiayaan kepada Debitur Inti¹⁾

a. Tabel Rencana Penyaluran Pembiayaan kepada Debitur Inti

No	Nama Debitur	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

No	Nama Debitur	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
	Total Penyaluran Pembiayaan kepada Debitur Inti				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) debitur perseorangan atau debitur badan usaha yang masuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada Perusahaan di luar pihak terkait dengan nilai pembiayaan awal minimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan kepada debitur inti)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan kepada debitur inti)

3. Rencana Penyaluran Pembiayaan kepada Pihak Terkait

a. Tabel Rencana Penyaluran Pembiayaan kepada Pihak Terkait

No	Nama Debitur Pihak Terkait	Jenis Pembiayaan	Skema Pembiayaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
					Des X-1	Juni X	Des X
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Total Penyaluran Pembiayaan kepada Pihak Terkait						
	Ekuitas						
	% Penyaluran Pembiayaan Pihak Terkait terhadap Ekuitas						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait)

4. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

a. Tabel Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Penyaluran Pembiayaan Baru:				
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2. Pertambangan dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan				
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin				
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
6. Konstruksi				
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
8. Pengangkutan dan Perdagangan				
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
10. Informasi dan Komunikasi				

Sektor Ekonomi	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
12. Real Estat				
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya				
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
16. Pendidikan				
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi				
19. Aktivitas Jasa Lainnya				
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				

Sektor Ekonomi	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha				
22. Rumah Tangga				
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
B. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>):				
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2. Pertambangan dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan				
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin				
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
6. Konstruksi				
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
8. Pengangkutan dan Perdagangan				
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				

Sektor Ekonomi	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
10. Informasi dan Komunikasi				
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
12. Real Estat				
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya				
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
16. Pendidikan				
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi				
19. Aktivitas Jasa Lainnya				
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				

Sektor Ekonomi	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha				
22. Rumah Tangga				
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran pembiayaan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran pembiayaan)

5. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Pembiayaan

a. Tabel Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Pembiayaan

Lokasi Pembiayaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penyaluran Pembiayaan Baru:				
1. Jawa Barat				
2. Banten				
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta				
4. Daerah Istimewa Yogyakarta				
5. Jawa Tengah				
6. Jawa Timur				
7. Bengkulu				
8. Jambi				

Lokasi Pembiayaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
9. Nanggroe Aceh Darussalam				
10. Sumatera Utara				
11. Sumatera Barat				
12. Riau				
13. Sumatera Selatan				
14. Kepulauan Bangka Belitung				
15. Kepulauan Riau				
16. Lampung				
17. Kalimantan Selatan				
18. Kalimantan Barat				
19. Kalimantan Timur				
20. Kalimantan Tengah				
21. Kalimantan Utara				
22. Sulawesi Tengah				
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Utara				
25. Gorontalo				
26. Sulawesi Barat				
27. Sulawesi Tenggara				
28. Nusa Tenggara Barat				
29. Bali				
30. Nusa Tenggara Timur				
31. Maluku				
32. Maluku Utara				
33. Papua				
34. Papua Barat				
35. Di Luar Indonesia				
B. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>):				

Lokasi Pembiayaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Jawa Barat				
2. Banten				
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta				
4. Daerah Istimewa Yogyakarta				
5. Jawa Tengah				
6. Jawa Timur				
7. Bengkulu				
8. Jambi				
9. Nanggroe Aceh Darussalam				
10. Sumatera Utara				
11. Sumatera Barat				
12. Riau				
13. Sumatera Selatan				
14. Kepulauan Bangka Belitung				
15. Kepulauan Riau				
16. Lampung				
17. Kalimantan Selatan				
18. Kalimantan Barat				
19. Kalimantan Timur				
20. Kalimantan Tengah				
21. Kalimantan Utara				
22. Sulawesi Tengah				
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Utara				
25. Gorontalo				
26. Sulawesi Barat				
27. Sulawesi Tenggara				
28. Nusa Tenggara Barat				

Lokasi Pembiayaan	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
29. Bali				
30. Nusa Tenggara Timur				
31. Maluku				
32. Maluku Utara				
33. Papua				
34. Papua Barat				
35. Di Luar Indonesia				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi pembiayaan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi pembiayaan)

Keterangan:

- 1) jenis kegiatan usaha baru meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. rencana pelaksanaan cara pembiayaan lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. rencana penggunaan akad lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. rencana perubahan fitur dari kegiatan usaha pembiayaan syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad yang sebelumnya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan lain dan/atau rencana pelaksanaan cara pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan lain dan/atau rencana pelaksanaan cara pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan)

2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Imbal Jasa, Rencana Penggunaan Akad yang Belum Pernah Digunakan Sebelumnya, Rencana Perubahan Fitur dari Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan Menggunakan Akad yang Sebelumnya Telah Dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang Wajib Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- a. Tabel Rencana Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Imbal Jasa, Rencana Penggunaan Akad yang Belum Pernah Digunakan Sebelumnya, Rencana Perubahan Fitur dari Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan Menggunakan Akad yang Sebelumnya Telah Dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang Wajib Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Jenis Kegiatan Usaha ¹⁾	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha ²⁾	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan ²⁾
				Bagi Perusahaan ²⁾	Bagi Debitur ²⁾	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Keterangan:

- 1) jenis kegiatan usaha meliputi:
- a. rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan berbasis imbal jasa yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. rencana perubahan fitur dari akad yang sebelumnya telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan)

Format 6 : Rencana Permodalan

1. Rencana Pemenuhan Rasio Permodalan

a. Tabel Rencana Pemenuhan Rasio Permodalan

Komponen Modal	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
1. Ekuitas yang Disesuaikan				
2. Aset yang Disesuaikan ¹⁾				
3. Rasio Permodalan ¹⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ dapat disertai dengan data pendukung yang lebih rinci.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan rasio permodalan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan rasio permodalan)

2. Proyeksi Permodalan

Keterangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Modal Disetor Awal				
Pemegang Saham Lama				
1. ...				
2. dst				
Pemegang Saham Baru				
1. ...				
2. dst				
Total Modal Disetor				
Laba ditahan				
Total Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

3. Rencana Perubahan Modal

a. Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

(diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan)

Format 7 : Rencana Pendanaan

1. Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan

a. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Pinjaman dari lembaga pemerintah				
2. Pinjaman dari bank				
3. Pinjaman dari industri keuangan nonbank				
4. Pinjaman dari lembaga dan/atau badan usaha lain				
5. Pinjaman subordinasi				
6. Penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum				
7. Penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum				
8. Sekuritisasi aset				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Pinjaman dari lembaga pemerintah				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. Pinjaman dari bank				
3. Pinjaman dari industri keuangan nonbank				
4. Pinjaman dari lembaga dan/atau badan usaha lain				
5. Pinjaman subordinasi				
6. Penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum				
7. Penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum				
8. Sekuritisasi aset				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				

- b. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Pendanaan dari lembaga pemerintah				
2. Pendanaan dari bank				
3. Pendanaan dari industri keuangan nonbank				
4. Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain				
5. Pendanaan subordinasi				
6. Penerbitan sukuk melalui penawaran umum				
7. Penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum				
8. Sekuritisasi aset				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				
1. Pendanaan dari lembaga pemerintah				
2. Pendanaan dari bank				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3. Pendanaan dari industri keuangan nonbank				
4. Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain				
5. Pendanaan subordinasi				
6. Penerbitan sukuk melalui penawaran umum				
7. Penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum				
8. Sekuritisasi aset				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				

c. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

d. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

2. Rencana Pendanaan berdasarkan Mata Uang

a. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Mata Uang

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Rupiah				
2. Dollar Amerika Serikat ¹⁾				
3. Yen Jepang ¹⁾				
4. Mata Uang Lainnya ¹⁾				
Total Penerimaan Pendanaan Baru ¹⁾				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Rupiah				
2. Dollar Amerika Serikat ¹⁾				
3. Yen Jepang ¹⁾				
4. Mata Uang Lainnya ¹⁾				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>) ¹⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ dikonversikan ke dalam rupiah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan mata uang)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan mata uang)

3. Rencana Pendanaan berdasarkan Akad Pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan
- a. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Akad Pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Akad <i>Mudharabah</i>				
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3. Akad <i>Musyarakah</i>				
4. Akad <i>Ijarah</i>				
5. Akad <i>Qardh</i>				
6. Akad Pendanaan Lainnya				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Akad <i>Mudharabah</i>				
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3. Akad <i>Musyarakah</i>				
4. Akad <i>Ijarah</i>				
5. Akad <i>Qardh</i>				
6. Akad Pendanaan Lainnya				

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan akad)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan akad)

Format 8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan ¹⁾	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi ²⁾	Keterangan ³⁾
PEMBUKAAN:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Selain Kantor Cabang 3. Kantor Cabang UUS 4. Kantor Selain Kantor Cabang UUS				
PENINGKATAN STATUS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG MENJADI KANTOR CABANG:				
1. Kantor Selain Kantor Cabang ... menjadi Kantor Cabang ... 2. Kantor Selain Kantor Cabang UUS ... menjadi Kantor Cabang UUS...				
PERUBAHAN ALAMAT:				
1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang ⁴⁾ a) Kantor Cabang b) Kantor Cabang UUS 3. Kantor Selain Kantor Cabang a) Kantor Selain Kantor Cabang b) Kantor Selain Kantor Cabang UUS				
PENUTUPAN:				
1. Kantor Cabang a) Kantor Cabang b) Kantor Cabang UUS				

Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan ¹⁾	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi ²⁾	Keterangan ³⁾
2. Kantor Selain Kantor Cabang a) Kantor Selain Kantor Cabang b) Kantor Selain Kantor Cabang UUS				

Keterangan:

- 1) Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta.
Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 3) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
- 4) Perubahan alamat kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Format 9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi)

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penggunaan konsultan atau penasihat, dan penggunaan tenaga kontrak Perusahaan)

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia)

b. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

1) Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No.	Materi Diklat ¹⁾	Metode Diklat ²⁾	Perkiraan Waktu Diklat ³⁾	Durasi Diklat ⁴⁾	Tempat	Narasumber /Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Biaya Diklat

Keterangan:

- 1) misal: manajemen risiko, *marketing*, dsb
- 2) diisi dengan *in house training* atau *out house training*
- 3) diisi dengan bulan pelaksanaan training, misal: bulan Maret 2020
- 4) diisi dengan lamanya waktu diklat misal: 3 hari

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan ¹⁾
1.							
2.							
3.							
...							

Keterangan:

- 1) diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia.

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing)

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

- a. Uraian Mengenai Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar, termasuk Informasi Mengenai Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

(Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan. Selain itu perlu diisi informasi mengenai perkiraan biaya pengembangan teknologi informasi.)

- b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

- c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

Format 10 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan

1. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

Asumsi	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Asumsi Makro ¹⁾ :				
1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)				
2. Nilai Tukar				
3. Tingkat Inflasi (%)				
4. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ²⁾				
Asumsi Mikro:				
1. Pertumbuhan Pembiayaan (%)				
2. Pertumbuhan Pendanaan (%)				
3. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pendanaan (%)				
4. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pembiayaan (%)				
5. Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah				
6. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ³⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) dalam hal tidak tersedia asumsi per semester, dapat menggunakan asumsi per tahun dan dapat disertai dengan penjelasan mengenai sumber instansi yang menjadi dasar asumsi makro yang digunakan.

2) asumsi makro lainnya, seperti pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor.

3) asumsi mikro lainnya, seperti pangsa Perusahaan terhadap industri.

2. Informasi Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan

a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
ASET				
1. Kas dan Setara Kas				
2. Tagihan Derivatif				
3. Piutang Pembiayaan - Neto				
4. Penyertaan Modal				
5. Investasi Dalam Surat Berharga				
6. Aset yang Disewa operasikan (<i>Operating Lease</i>) – Neto				
7. Aset Tetap dan Inventaris – Neto				
8. Aset Pajak Tangguhan				
9. Rupa-Rupa Aset				
Jumlah Aset				
LIABILITAS				
1. Liabilitas Segera				
2. Liabilitas Derivatif				
3. Utang Pajak				
4. Pinjaman yang Diterima				
5. Surat Berharga yang Diterbitkan				
6. Liabilitas Pajak Tangguhan				
7. Pinjaman Subordinasi				
8. Rupa-Rupa Liabilitas				
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
1. Modal				
a. Modal Disetor				
b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib				
c. Tambahan Modal Disetor				
1) Agio				
2) Disagio				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3) Modal Saham yang Diperoleh Kembali				
4) Biaya Emisi Efek Ekuitas				
5) Modal Hibah				
6) Tambahan Modal Disetor Lainnya				
d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali				
2. Cadangan				
a. Cadangan Umum				
b. Cadangan Tujuan				
3. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan				
4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak				
5. Komponen Ekuitas Lainnya				
a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
b. Keuntungan (Kerugian) Komperehensif Lainnya Periode Berjalan				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

b. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
ASET				
1. Kas dan Setara Kas				
2. Tagihan Derivatif				
3. Piutang Pembiayaan - Neto				
4. Penyertaan Modal				
5. Investasi dalam Surat Berharga Syariah				
6. Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan – Neto				
7. Aset Tetap dan Inventaris – Neto				
8. Aset Pajak Tangguhan				
9. Rupa-Rupa Aset				
Jumlah Aset				
LIABILITAS				
1. Liabilitas Segera				
2. Liabilitas Derivatif				
3. Utang Pajak				
4. Pendanaan yang Diterima				
5. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan				
6. Liabilitas Pajak Tangguhan				
7. Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi				
8. Rupa-Rupa Liabilitas				
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
1. Modal				
a. Modal Disetor / Modal Kerja				
b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib				
c. Tambahan Modal Disetor				
1) Agio				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2) Disagio				
3) Modal Saham yang Diperoleh Kembali				
4) Biaya Emisi Efek Ekuitas				
5) Modal Hibah				
6) Tambahan Modal Disetor Lainnya				
d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali				
2. Cadangan				
a. Cadangan Umum				
b. Cadangan Tujuan				
3. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan				
4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak				
5. Komponen Ekuitas Lainnya				
a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

3. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

a. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Operasional				
a. Pendapatan Kegiatan Operasi				
1) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional				
a) Pembiayaan Investasi				
(1) Sewa Pembiayaan				
(2) Jual dan Sewa-Balik				
(3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
(4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
(5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran				
(6) Pembiayaan Proyek				
(7) Pembiayaan Infrastruktur				
(8) Skema Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
b) Pembiayaan Modal Kerja				
(1) Jual dan Sewa-Balik				
(2) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
(3) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang				
(4) Fasilitas Modal Usaha				
(5) Skema Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
c) Pembiayaan Multiguna				
(1) Sewa Pembiayaan				
(2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran				
(3) Fasilitas Dana				
(4) Skema Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
d) Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah				
a) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli				
b) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi				
c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa				
3) Pendapatan dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan				
4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama				
b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan				
1) Pendapatan Administrasi				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2) Pendapatan Provisi				
3) Pendapatan Denda				
4) Diskon Asuransi				
5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya				
c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan				
1) Pendapatan dari Sewa Operasi				
2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>				
a) Pemasaran Produk Reksadana				
b) Pemasaran Produk Asuransi				
c) Pemasaran Produk Lainnya				
3) Pendapatan Operasional Lainnya Tidak Terkait Pembiayaan				
2. Pendapatan Non-Operasional				
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro				
b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya				
Total Pendapatan				
BEBAN				
1. Beban Operasional				
a. Beban Bunga				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima				
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan				
3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah				
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>				
c. Beban Premi Asuransi/Kontribusi Asuransi Syariah				
d. Beban Tenaga Kerja				
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan				
2) Beban Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja				
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya				
e. Beban Pemasaran				
1) Beban Insentif Pihak Ketiga				
2) Beban Pemasaran Lainnya				
f. Beban Penyisihan/Penyusutan				
1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu:				
a) Beban Operasional Pembiayaan Investasi				
b) Beban Pembiayaan Modal Kerja				
c) Beban Pembiayaan Multiguna				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
d) Beban Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
e) Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah				
2) Beban Penyusutan Aset Tetap yang Di Sewa Operasikan				
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris				
g. Beban Sewa				
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan				
i. Beban Administrasi dan Umum				
j. Beban Operasional Lainnya				
2. Beban Non-Operasional				
Total Beban				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN				
1. Pajak Tahun Berjalan -/-				
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan				
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK				
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing				
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual				
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas				
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan				
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Operasional				
a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan				
1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli				
a) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>				
b) Pendapatan Margin <i>Salam</i>				
c) Pendapatan Margin <i>Istishna</i>				
d) Pendapatan Margin dengan akad jual beli lainnya				
2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi				
a) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>				
b) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>				
c) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>				
e) Pendapatan Bagi Hasil dari akad investasi lainnya				
3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa				
a) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ijarah</i>				
b) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
c) Pendapatan Imbal Jasa <i>Hawalah bil ujah</i>				
d) Pendapatan Imbal Jasa <i>Wakalah bil ujah</i>				
e) Pendapatan Imbal Jasa <i>Kafalah bil ujah</i>				
f) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ju'alah</i>				
g) Pendapatan Imbal Jasa dari akad pembiayaan jasa lainnya				
4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
5) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan				
1) Pendapatan administrasi				
2) Pendapatan Provisi				
3) Pendapatan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)				
4) Diskon Asuransi				
5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya				
2. Pendapatan Non-Operasional				
a. Pendapatan imbal jasa/Jasa Giro				
b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya				
Jumlah Pendapatan				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
BEBAN				
1. Beban Operasional				
a. Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa				
1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah</i>				
2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Musyarakah</i>				
4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Ijarah</i>				
5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> untuk kegiatan pembiayaan				
6) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad pendanaan lainnya				
b. Beban Premi <i>Swap</i>				
c. Beban Kontribusi Asuransi Syariah				
d. Beban Tenaga Kerja				
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan				
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja				
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya				
e. Beban Pemasaran				
1) Beban Insentif Pihak ketiga				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2) Beban Pemasaran lainnya				
f. Beban Penyisihan/Penyusutan				
1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu:				
a) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Jual Beli				
b) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Investasi				
c) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Jasa				
2) Beban Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus <i>ijarah</i>)				
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris				
g. Beban Sewa				
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan				
i. Beban Administrasi dan Umum				
j. Beban Operasional Lainnya				
2. Beban Non Operasional				
Jumlah Beban				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN				
1. Pajak Tahun Berjalan -/-				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan				
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK				
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap				
2. Selisih Lebih (Kurang) Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing				
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual				
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas				
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan				
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

4. Proyeksi Laporan Arus Kas

a. Proyeksi Laporan Arus Kas Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi				
1. Arus Kas Surplus (Defisit)				
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi				
1) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi				
2) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja				
3) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna				
4) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah				
5) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
6) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>				
7) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi				
8) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
9) Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
10) Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
11) Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya				
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi				
1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi				
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja				
3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna				
4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah				
5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
6) Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga				
7) Arus Kas Keluar untuk Beban Umum dan Administrasi				
8) Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan				
9) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
10) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
11) Arus Kas Keluar untuk Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
12) Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya				
B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi				
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan				
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Diperjualbelikan				
d. Arus Kas Masuk dari Dividen				
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi				
f. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Investasi Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi				
a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan				
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga yang Tidak Dimaksudkan untuk Diperjualbelikan				
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Investasi Lainnya				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan				
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga				
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham				
c. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Pendanaan Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan				
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan				
b. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan				
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen				
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Pendanaan Lainnya				
D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas				
E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

b. Proyeksi Laporan Arus Kas Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi				
1. Penerimaan Kas dari Kegiatan Operasi				
a. Penerimaan dari Pembiayaan Jual Beli				
1) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>				
2) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Salam</i>				
3) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Istishna</i>				
4) Penerimaan dari Akad Pembiayaan Jual Beli Lainnya				
b. Penerimaan dari Pembiayaan Investasi				
1) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>				
2) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>				
3) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
4) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>				
5) Penerimaan dari Akad Pembiayaan Investasi Lainnya				
c. Penerimaan dari Pembiayaan Jasa				
1) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>				
2) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>IMBT</i>				
3) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Hawalah bil ujarah</i>				
4) Penerimaan dari Pembiayaan <i>Wakalah bil ujarah</i>				
5) Penerimaan dari Pembiayaan <i>Kafalah bil ujarah</i>				
6) Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan <i>Ju'alah</i>				
7) Penerimaan dari Pembiayaan <i>Qardh</i>				
8) Penerimaan dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya				
d. Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
e. Penerimaan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
f. Penerimaan dari Surat Berharga yang Diperjualbelikan				
g. Penerimaan dari Pendapatan Kegiatan operasi lainnya				
2. Pembayaran Kas untuk Kegiatan Operasi				
a. Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Jual Beli</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>				
2) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Salam</i>				
3) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Istishna</i>				
4) Pembayaran untuk Akad Pembiayaan Jual Beli Lainnya				
b. Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi				
1) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>				
2) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>				
3) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
4) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>				
5) Pembayaran untuk Akad Pembiayaan Investasi Lainnya				
c. Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa				
1) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>				
2) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan IMBT				
3) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Hawalah bil ujah</i>				
4) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Wakalah bil ujah</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
5) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Kafalah bil ujah</i>				
6) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Ju'alah</i>				
7) Pembayaran untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Qardh</i>				
8) Pembayaran untuk Kegiatan Akad Pembiayaan Jasa Lainnya				
d. Pembayaran untuk Beban Umum dan Administrasi				
e. Pembayaran untuk Pajak Penghasilan				
f. Pembayaran dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
g. Pembayaran dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
h. Pembayaran untuk Perolehan Surat Berharga yang Diperjualbelikan				
i. Pembayaran untuk Aktivitas Operasi Lainnya				
B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi				
1. Penerimaan Kas dari Kegiatan Investasi				
a. Penerimaan dari Pelepasan Anak Perusahaan				
b. Penerimaan dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Dimaksudkan untuk Diperjualbelikan				
d. Penerimaan Dividen				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
e. Penerimaan Bagi Hasil dari Kegiatan Investasi				
f. Penerimaan dari Aktivitas Investasi Lainnya				
2. Pembayaran Kas untuk Kegiatan Investasi				
a. Pembayaran untuk Perolehan atas Anak Perusahaan				
b. Pembayaran untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Pembayaran untuk Perolehan Surat Berharga yang Tidak Diperjualbelikan				
d. Pembayaran untuk Aktivitas Investasi Lainnya				
C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
1. Penerimaan Kas dari Kegiatan Pendanaan				
a. Penerimaan dari Pendanaan Bank				
1) Akad <i>Mudharabah</i>				
2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3) Akad <i>Musyarakah</i>				
4) Akad Lainnya				
b. Penerimaan dari Pendanaan Nonbank				
1) Akad <i>Mudharabah</i>				
2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3) Akad <i>Musyarakah</i>				
4) Akad Lainnya				
c. Penerimaan dari Pinjaman (<i>qardh</i>) Subordinasi				
d. Penerimaan dari Penerbitan Sukuk				
e. Penerimaan dari Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah				
f. Penerimaan dari Pendanaan Lainnya Sesuai dengan Prinsip Syariah				
g. Penerimaan dari Penerbitan Modal Saham				
h. Penerimaan Setoran Modal Kerja (khusus UUS)				
2. Pembayaran Kas untuk Kegiatan Pendanaan				
a. Pengeluaran dari Pendanaan Bank				
1) Akad <i>Mudharabah</i>				
2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3) Akad <i>Musyarakah</i>				
4) Akad Lainnya				
b. Pengeluaran dari Pendanaan Nonbank				
1) Akad <i>Mudharabah</i>				
2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3) Akad <i>Musyarakah</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
4) Akad Lainnya				
c. Pengeluaran dari Pendanaan Pinjaman (<i>qardh</i>) Subordinasi				
d. Pengeluaran dari Penerbitan Sukuk				
e. Pengeluaran dari Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah				
f. Pengeluaran dari Pendanaan Lainnya Sesuai dengan Prinsip Syariah				
g. Pembayaran untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan (<i>treasury stock</i>)				
h. Pembayaran Dividen				
D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas				
E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

5. Proyeksi Rekening Administratif

a. Proyeksi Rekening Administratif Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik				
a. Dalam Negeri				
1) Bank				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank				
3) Lainnya				
b. Luar Negeri				
1) Bank				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank				
3) Lainnya				
Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik				
Penerbitan Surat Sanggup Bayar				
Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai				
a. <i>Interest Rate Swap</i>				
b. <i>Currency Swap</i>				
c. <i>Cross Currency Swap</i>				
d. <i>Forward</i>				
e. <i>Option</i>				
f. <i>Future</i>				
g. Lainnya				
Rekening Administratif Lainnya				
a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih				
c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih				
Jumlah				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan rekening administratif mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

b. Proyeksi Rekening Administratif Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik				
a. Dalam Negeri				
1) Bank				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank				
3) Lainnya				
b. Luar Negeri				
1) Bank				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank				
3) Lainnya				
Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen yang Belum Ditarik				
Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah				
a. Pendanaan Dalam Negeri				

Pos-Pos ¹⁾	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
b. Pendanaan Luar Negeri				
Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah				
a. <i>Spot</i>				
b. <i>Forward Agreement</i>				
Rekening Administratif Lainnya				
a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku				
b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih				
c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih				
Jumlah				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan rekening administratif mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

Format 11 : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu

1. Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu bagi Perusahaan Pembiayaan

Rasio dan Pos Tertentu ¹⁾	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. <i>Gearing Ratio</i> (kali)				
2. Penyertaan Modal/Ekuitas (%)				
3. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Neto terhadap Total Aset (<i>Financing to Asset Ratio</i>) (%)				
4. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)				
5. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja Dibandingkan dengan Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Sebelum Dikurangi Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan yang Telah Dibentuk (%)				
6. Modal Sendiri/Modal Disetor (%)				
7. Rasio Permodalan (%)				
8. NPF <i>Gross</i> (%)				
9. NPF <i>Netto</i> (%)				
10. ROE (%)				
11. ROA (%)				
12. BOPO (%)				
13. NIM (%)				
14. <i>Current Ratio</i> (%)				
15. <i>Cash Ratio</i> (%)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

- 1) tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

2. Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah

Rasio dan Pos Tertentu ¹⁾	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. <i>Gearing Ratio</i> (kali)				
2. Penyertaan Modal/Ekuitas (%)				
3. Rasio Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Neto terhadap Total Aset (<i>Financing to Asset Ratio</i>)				
4. Rasio Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Neto terhadap Total Pendanaan yang Diterima				
5. Rasio Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) untuk Tujuan Usaha Produktif Dibandingkan dengan Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Sebelum Dikurangi Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang Telah Dibentuk (%)				
6. Modal Sendiri/Modal Disetor (%)				
7. Rasio Permodalan (%)				
8. Rasio Aset Produktif Bermasalah <i>Gross</i> (%)				
9. Rasio Aset Produktif Bermasalah <i>Netto</i> (%)				
10. ROE (%)				
11. ROA (%)				
12. BOPO (%)				
13. NIM (%)				
14. <i>Current Ratio</i> (%)				
15. <i>Cash Ratio</i> (%)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

- 1) tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

Format 12 : Rencana Penyertaan Langsung

1. Rincian Rencana Penyertaan Langsung

Nama Perusahaan Anak	Kinerja Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

2. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan penyertaan langsung)

3. Strategi

(diisi dengan strategi penyertaan langsung)

Format 13 : Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan

1. Rencana Penggabungan

a. Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Perusahaan yang menggabungkan diri:

1)

2)

3)

Perusahaan yang menerima penggabungan:

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan penggabungan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi penggabungan)

2. Rencana Peleburan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan:

Perusahaan yang meleburkan diri:

1)

2)

3)

Perusahaan setelah peleburan:

b. Alasan, Pertimbangan, dan Tujuan

(diisi dengan alasan, pertimbangan, dan tujuan peleburan)

c. Strategi dan Langkah-Langkah Pelaksanaan

(diisi dengan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan peleburan)

3. Rencana Pemisahan

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan:

Perusahaan yang memisahkan diri:

Perusahaan hasil pemisahan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) dst

b. Alasan dan Pertimbangan

<p>(diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan)</p>

c. Strategi

<p>(diisi dengan strategi pemisahan)</p>
--

Format 14 : Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan

1. Penjelasan

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan, termasuk mengenai alasan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan)

2. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan)

3. Strategi

(diisi dengan strategi penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan)

Format 15 : Rencana Konversi Perusahaan Pembiayaan Menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah

1. Keterangan mengenai rencana konversi:
Perusahaan hasil konversi:

2. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan konversi)

3. Strategi

(diisi dengan strategi konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah)

Format 16 : Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahan UUS

1. Rencana Pembentukan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pembentukan:

UUS hasil pembentukan:

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan pembentukan UUS)

c. Strategi

(diisi dengan strategi pembentukan UUS)

2. Rencana Penutupan UUS

a. Keterangan mengenai rencana penutupan:

UUS yang ditutup:

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan penutupan UUS)

c. Strategi

(diisi dengan strategi penutupan UUS)

3. Rencana Pemisahan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan:

UUS yang memisahkan diri:

Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil pemisahan:

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan pemisahan UUS)

c. Strategi

(diisi dengan strategi pemisahan UUS)

Format 17 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
 - 1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 4;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 5;
 - 3) realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam format 7;
 - 4) realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam format 9; dan
 - 5) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 10.
- b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada huruf a, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
- c. Diisi dengan upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
- d. Diisi dengan rasio keuangan dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 11.
- e. Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
 - 1) realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam format 6;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam format 8;
 - 3) realisasi atas rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam format 12;
 - 4) realisasi atas rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam format 13;
 - 5) realisasi atas rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam format 14;
 - 6) realisasi atas rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam format 15; dan
 - 7) realisasi atas rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam format 16.

Diketahui oleh:	
Direksi:	(ttd dan nama terang)
Direksi:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Format 18 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

(diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan.

Disetujui oleh:	
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana